

## **KOORDINASI LINTAS SEKTORAL DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN LANDAK**

**Fuaddianto Fajar Satrio**

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura  
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail : [fuang.andalan@yahoo.com](mailto:fuang.andalan@yahoo.com)

### **Abstrak**

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Koordinasi Lintas Sektoral Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Landak dengan fokus kepada koordinasi yang efektif dalam pengembangan pariwisata. Judul skripsi ini diambil berdasarkan permasalahan koordinasi lintas sektoral dalam pengembangan pariwisata yang masih belum optimal dibandingkan dengan Koordinasi Lintas Sektoral Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten lainnya. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan tiga tahap analisis data yaitu pertama reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Subjek penelitian ini adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan yang terlibat dalam koordinasi pengembangan pariwisata. Kesimpulan penelitian ini belum optimalnya koordinasi yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kepemimpinan yang kurang tegas, tidak adanya dinamisme dalam koordinasi, perumusan wewenang dan tanggung jawab yang kurang jelas dan organisasi yang tidak sederhana. Untuk itu maka rekomendasi untuk koordinasi yang telah dilakukan yaitu mengadakan perubahan terhadap proses koordinasi horizontal dengan melihat hasil yang telah didapat untuk ditinjau kembali sesuai dengan faktor-faktor koordinasi yang harus diperbaiki sesuai dengan tujuannya.

Kata Kunci : Koordinasi, Lintas Sektoral, Pengembangan Pariwisata

### **Abstract**

The research is intended to determine how the Intersectoral Coordination in the Development of Tourism in Landak Regency with a focus on the effectiveness of coordination in tourism's development . The title of this script is taken based on the problem of cross-sectoral coordination in tourism's development that still can not be optimal compare with Intersectoral Coordination in tourism's development in the other districts. This research use qualitative analysis in three stages: first analysis of the data reduction, data presentation and a final conclusion. The research location is in District Ngabang, Landak Regency. Subject of this research is the Department of Youths, Sports, Cultures and Tourisms with the Department of Public Working and Housing who are involve in the coordination of tourism's development. The conclusion of this research is ; The coordination still can not be optimal cause by several factors: the lack of decisive leadership, the lack of dynamism in the coordination, formulation of authority and responsibility are not clear and the complexity of organization. The recommendation for coordination has been done is make changes to the horizontal coordination process by looking at the results that have been obtained for reconsideration in accordance with the coordination of the factors that must be corrected in accordance with its objectives.

Keywords: Coordination, Cross-Sectoral, Tourism Development

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan.

Peningkatan keterpaduan melalui pola koordinasi pemerintah, keterbukaan dan pemberian wewenang kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam mengurus urusan di suatu bidang pembangunan. Namun demikian tidaklah sepenuhnya harapan itu bisa dilakukan dengan baik, berbagai kelemahan-kelemahan dijumpai termasuk kesiapan aparatur termasuk Sumber daya manusianya, koordinasi dengan bertumpu pada penyatuan persepsi dengan integritas dalam kesatuan tindakan dalam bekerja dan kesamaan gerak dalam bekerja ini belum maksimal, ditambah lagi adanya kecenderungan aparat dalam bekerja sering muncul perbedaan dan penafsiran dalam melihat suatu kebijakan akhirnya akan menunjukkan belum tercermin kompetensi dalam menyelenggarakan sepenuhnya roda pemerintahan secara utuh. Sebagai contoh tentang pentingnya koordinasi ini

dijalankan, berdasarkan pengamatan diperoleh informasi bahwa masih adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar instansi terkait dalam pengembangan pariwisata. Apabila suatu organisasi dapat bekerja secara harmonis dan efisien dengan organisasi lain, maka manajemen pada semua tingkatan harus memusatkan perhatian mereka pada koordinasi, sebab koordinasi dapat berfungsi untuk mensinkronkan kegiatan dalam mencapai tujuan bersama.

Kabupaten Landak memiliki banyak potensi alam berupa objek wisata alam, objek wisata budaya dan objek wisata sejarah yang jika dikelola dengan baik maka akan menghasilkan nilai jual yang sangat bermanfaat bagi Pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan salah satu objek wisata unggulan yang dimiliki Kabupaten Landak adalah Air Terjun manangar yang menjadi ikon karena merupakan Air Terjun tertinggi dengan ketinggian 60 meter dan lebar 60 meter. Dimana di daerah sekitar air terjun masih memiliki kealamian dari keindahan alam yang memukau. Dengan kelebihan yang dimiliki itulah terdapat investor dari Korea yang ingin menanamkan modalnya untuk pengembangan Air Terjun Manangar menjadi PLTA karena memiliki potensi untuk di bangun PLTA dan akan mengembangkan tempat wisata yang ada di sekitar Air Terjun Manangar. Namun investor tersebut batal untuk menanamkan modalnya dikarenakan belum siapnya pemerintah setempat untuk memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi.

Kesiapan tersebut seperti pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana jalan untuk menuju Air Terjun Manangar. Padahal untuk dilihat bahwa untuk mengatasi permasalahan itu

seharusnya peran pemerintah harus diperkuat dalam peningkatan koordinasi lintas sektoral untuk mempersiapkan semuanya. Koordinasi lintas sektoral yang terlibat seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan yang bertugas untuk membangun sarana dan prasana berupa jalan dan penataan tempat wisata, sedangkan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang bertugas untuk mempromosikan objek-objek wisata yang ada dan mengelola objek wisata secara baik dan berkelanjutan serta membuat kegiatan kebudayaan yang bertujuan untuk mempromosikan budaya Kabupaten Landak.

Berdasarkan hasil observasi ditemukan beberapa fenomena yang terjadi terhadap koordinasi lintas sektoral yang terjadi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Landak. Fenomena yang pertama berdasarkan observasi pada beberapa tempat-tempat wisata seperti Air Terjun Manangar sarana prasarana seperti jalan masih jauh dari kata layak untuk dilewati para wisatawan. Kondisi jalan yang berlubang dan tidak semuanya aspal tapi menggunakan jalan perusahaan yang mana terbuat dari tanah liat jika hujan maka jalanan akan tergenang air dan sangat susah untuk dilewati. Selama diperjalanan sinyal telpon seluler masih belum semuanya ada, seperti di beberapa titik masih tidak terdapat sinyal. Untuk keamanan sendiri tempat wisata ini masih belum dikelola oleh pemerintah sehingga belum ada prasarana yang memang dibuat untuk wisatawan. Hal serupa terjadi juga di Objek Wisata Rumah Betang Saham, dimana sarana jalan menuju objek wisata terdapat 2 arah. Jalan pertama melalui Pahuman dan yang kedua Simpang Aur. Jika melewati Pahuman kita akan melewati hutan belantara dengan jarak yang lebih

dekat dibandingkan melewati Simpang Aur, kondisi jalan sendiri terbilang bagus namun lebar jalan sendiri hanya muat satu kendaraan mobil dan jika bertemu dengan kendaraan lain didepan pastinya mengalah terlebih dahulu. Waktu yang ditempuh sekitar 45 menit dari jalan raya. Untuk jalur ini masih terbilang belum aman bila pengunjung terjadi sesuatu dengan kendaraannya karena masih belum terdapat bengkel atau pun empat persinggahan terkecuali terdapat kampung yang bisa untuk diminta pertolongan.

Jalur kedua yang digunakan yaitu melalui Simpang Aur, jalur ini lebih jauh dibandingkan dengan melewati Pahuman. Namun untuk jalur ini terbilang aman karena kita akan melewati kampung-kampung warga sekitar, sehingga jika terjadi sesuatu kita dapat meminta bantuan. Kondisi jalan di jalur ini sangat memprihatikan karena jalan yang sempit dan berlubang membuat pengendara harus berhati-hati melewatinya. Sesampainya di Rumah Betang Saham Suku Dayak kondisi Rumah Bersejarah itu masih terbilang sangat alami belum ada perubahan dalam bangunan tersebut. Sinyal telpon seluler pun tidak akan kita temui apalagi tempat penginapan untuk bermalam disana belum ada. Dengan tidak adanya sinyal ini membuat wisatawan susah untuk mempromosikan maupun mendokumentasikan objek wisata ini secara langsung.

Berangkat dari pernyataan di atas lembaga pemerintahan masih ditemukan beberapa kelemahan-kelemahan dalam penyebaran pembangunan yang tentunya dibutuhkan kesiapan dalam menjalankan berbagai aktivitas pembangunan, yang harus dipahami bahwa aparat pemerintah dalam menjalankan fungsinya dituntut mampu mengkoordinasikan perencanaan pembangunan agar kiranya dapat seiring akan pelaksanaan yang dirasakan langsung oleh

masyarakat. Aparat telah mengembang tugas dan tanggung jawab dalam Koordinasi dengan pemerintah baik pusat, daerah maupun pihak Kecamatan dimana didalamnya terdapat beberapa kelemahan-kelemahan dalam penyelenggaraannya termasuk kesadaran aparat akan pentingnya fungsi koordinasi.

Atas dasar itulah sehingga Peneliti melalui kesempatan ini, dicoba menelusuri permasalahan Penerapan fungsi Koordinasi aparat pemerintah Kabupaten, sehingga diangkat suatu penelitian sederhana dengan judul Koordinasi Lintas Sektoral Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Landak.

## 2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka rumusan permasalahan ini adalah Bagaimana Koordinasi Yang Efektif Dilakukan Oleh Lintas Sektoral Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Landak?

## 3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, fokus penelitian, dan rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji Kepemimpinan pada Koordinasi Lintas Sektoral dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Landak;
2. Untuk mengkaji Dinamisme pada Koordinasi Lintas Sektoral dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Landak;
3. Untuk mengkaji Perumusan Wewenang dan Tanggung Jawab yang jelas pada Koordinasi Lintas Sektoral dalam

Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Landak;

4. Untuk mengkaji Organisasi yang sederhana pada Koordinasi Lintas Sektoral dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Landak.

## 4. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan menambah khasana keilmuan dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yaitu pada ilmu Koordinasi Lintas Sektoral Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Landak dengan memfokuskan 4 (empat) faktor koordinasi yang efektif yaitu Kepemimpinan, Dinamisme, Perumusan Wewenang dan Tanggung Jawab yang jelas dan Organisasi yang sederhana. Dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Landak dalam membuat kebijakan, agar koordinasi lintas sektoral dalam pengembangan pariwisata berjalan optimal.

## B. TEORI DAN METODOLOGI

### 1. Teori

Menurut James A.F Stoner and Charles Wankel (dalam Moekijat 1994:3) "Koordinasi adalah proses menyatupadukan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit (bagian-bagian atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi yang terpisah untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi secara efisien. Dari penjelasan koordinasi diatas maka dapat disimpulkan tujuan-tujuan yang berbeda dari masing-masing unit harus di satupadukan antar unit lainnya agar mencapai tujuan yang sudah direncanakan bersama. James Mooney (dalam Moekijat 1994:3) merumuskan "Koordinasi sebagai pengaturan usaha kelompok secara rapi untuk memberikan kesatuan tindakan guna mencapai tujuan

bersama". Untuk memperjelas arti dan pengertian dari koordinasi itu sendiri dibawah ini akan peneliti kemukakan beberapa pendapat ahli. Menurut Henry Fayol (dalam Sutarto 1993:74) bahwa Mengkoordinasikan berarti "mengikat bersama, menyatukan menselaraskan semua kegiatan dan usaha.

Koordinasi menurut UUD 1945 secara sederhana dapat ditafsirkan bahwa koordinasi itu adalah bekerja bersama seerat-eratnya dibawah seorang pemimpin. Karena itu koordinasi dapat terwujud bila ada kerjasama yang seerat-eratnya dari dua atau lebih pihak dalam mewujudkan sesuatu. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah adalah Upaya yang dilaksanakan oleh Kepala Wilayah guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan kemampuan pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal, dan antara instansi vertikal dengan dinas daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.

Menurut Tosi dan Carrol (dalam Moekijat 1994:29) ada dua jenis koordinasi, yakni koordinasi vertikal dan koordinasi horisontal. Baik koordinasi vertikal maupun koordinasi horisontal diperlukan dalam organisasi. "Koordinasi vertikal menunjukkan pengembangan hubungan-hubungan yang efektif dan yang disatupadukan di antara kegiatan-kegiatan pada tingkat-tingkatnorganisasi yang berlainan. Koordinasi horisontal adalah pengembangan hubungan-hubungan yang lancar di antara individu-individu atau kelompok-kelompok pada tingkat yang sama". Syarat-syarat koordinasi menurut Tripathi dan Reddy (dalam Moekijat 1994:39) ada 9 syarat untuk mencapai koordinasi yang efektif, yakni :

a. Hubungan langsung

Koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung di antara

orang-orang yang bertanggungjawab. Melalui hubungan pribadi langsung, ide-ide, cita-cita, tujuan-tujuan, pandangan-pandangan dapat dibicarakan dan salah paham, apabila ada dapat dijelaskan jauh lebih baik ketimbang melalui metode apapun lainnya.

b. Kesempatan awal

Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembutaan kebijaksanaan. Mislanya, sambil mempersiapkan rencana itu sendiri harus ada konsultasi bersama. Dengan cara demikian tugas penyesuaian dan penyatuan dalam proses pelaksanaan rencana menjadi lebih mudah.

c. Kontinuitas

Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan. Oleh karena koordinasi merupakan dasar struktur organisasi, maka koordinasi harus berlangsung selama organisasi melaksanakan fungsinya.

d. Dinamisasi

Koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan-perubahan lingkungan yang baik intern maupun ekstern. Dengan kata lain koordinasi jangan sampai kaku. Koordinasi ini akan meredakan masalah-masalah apabila timbul koordinasi yang baik sekali akan mengetahui secara dini dan mencegah kejadiannya.

e. Tujuan yang jelas

Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif dalam suatu organisasi. Pimpinan harus diberitahu tentang tujuan organisasi dan dimintas agar bekerja untuk tujuan bersama perusahaan. Suatu tujuan yang jelas dan diberitahukan

secara efektif kepada kepala-kepala bagian dimaksudkan untuk menghasilkan keselarasan tindakan.

f. Organisasi yang sederhana

Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif. Penyusunan kembali bagian-bagian dapat dipertimbangkan untuk memiliki koordinasi di antara kepala-kepala bagian. Pelaksanaan pekerjaan dan fungsi yang erat berhubungan dapat ditempatkan di bawah beban seseorang pejabat pimpinan apabila hal ini akan mempermudah pengambilan tindakan yang diperlukan untuk koordinasi.

g. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas

Faktor lain yang memudahkan koordinasi adalah definisi wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing individu dan bagian. Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pelaksanaan pekerjaan dengan kesatuan tujuan. Selanjutnya, wewenang yang jelas membantu pimpinan dalam memelihara orang-orang bawahan bertanggung jawab atas pelanggaran pembatasan-pembatasan.

h. Komunikasi yang efektif

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik. melalui saling tukar informasi secara terus menerus, perbedaan-perbedaan individu dan bagian dapat diatasi dan perubahan-perubahan kebijaksanaan, penyesuaian program-program, program-program untuk waktu yang akan datang. Melalui komunikasi yang efektif tindakan-tindakan atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan organisasi

dapat dihindarkan dan kegiatan-kegiatan keseluruhan staf dapat diarahkan secara harmonis menuju ke pelaksanaan tujuan organisasi yang telah ditentukan.

i. Kepemimpinan dan supervise yang efektif

Suksesnya koordinasi banyak dipengaruhi oleh hakikat kepemimpinan dan supervise. Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaan. Pemimpin yang efektif membuat kepercayaan terhadap orang-orang bawahan dan memelihara juga semangat kerja mereka. Sesungguhnya, kepemimpinan yang efektif merupakan metode koordinasi yang paling baik dan tidak ada metode lain yang menggantikannya.

Sehubungan dengan pengembangan sektor kepariwisataan, menurut Yoeti (dalam Yoeti 2002:42) pengembangan kawasan wisata memiliki kriteria khusus. Beberapa aspek perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengembangan kawasan wisata adalah cara-cara pengelolaan, pengusaha, serta penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan. Adapun daerah-daerah yang bisa dijadikan kawasan wisata khususnya ekowisata adalah :

- a. Daerah atau wilayah yang diperuntukan sebagai kawasan pemanfaatan berdasarkan rencana pengelolaan pada kawasan tersebut.
- b. Daerah atau zona pemanfaatan kawasan taman nasional.
- c. Daerah pemanfaatan untuk wisata berburu berdasarkan rencana pengelolaan kawasan taman berburu.

2. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini digunakan

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap dan rinci seluruh hal yang berkenaan dengan fenomena yang terjadi di lapangan .

Subjek pada penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini antara lain (1) Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Landak; (2) Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Landak; (3) Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Landak; (4) Staf-staf Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (5) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Landak; (6) Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan; (7) Staf-staf di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan..

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi horisontal lintas sektoral yang dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dengan Dinas Pekerjaan Umum masih belum optimal, hal ini terjadi adanya beberapa faktor yang menghambat terjadinya koordinasi yang efektif. Faktor pertama adalah kepemimpinan yang mana pola kepemimpinan dari unsur pimpinan yang kurang tegas dan kurang mengkoordinir bawahan dengan baik. Kepemimpinan yang kurang optimal berdampak pada koordinasi yang dilakukan

dalam pengembangan pariwisata. Seperti sifat atasan kepada bawahan dalam menjalankan suatu organisasi masih kurang terjalin hubungan yang baik. Faktor kedua adalah dinamisme, koordinasi yang dilakukan oleh instansi yaitu hanya dengan cara mengundang pimpinan instansi lain dalam setiap kegiatan saja namun bukan pada pertemuan yang secara khusus membicarakan pembangunan pariwisata saja. Hal ini menyebabkan tidak adanya tujuan yang jelas dilakukan dalam pelaksanaan koordinasi dalam pembangunan pariwisata.

Faktor yang ketiga adalah perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, terdapat ego sektoral antara instansi yang berdampak pada merasa kalau wewenangnya bukan berasal dari instansi itu namun melibatkan atau melarikan ada instansi lainnya yang dirasa sesuai dengan tujuannya. Masi terjadi pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi dalam proses pemabangunan pariwisata yang berdampak pada pembangunan yang tidak mendapatkan hasil maksimal. Faktor terakhir adalah organsiasi yang sederhana, instansi terbagi menjadi sebuah organisasi yang membawahi banyak bidang yang beraneka ragam dengan latar belakang yang berbeda seperti pemuda, olahraga, kebudyaan dan pariwisata. Dengan keanekaragam bidang tersebut terdapat juga pembagian anggaran sehingga membuat anggaran dibagi menjadi lebih kecil sehinggann pelaksanaan pembangunan tidak dapat berjalan sesuai rencana.

### D. Simpulan dan Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Koordinasi Lintas Sektoral Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Landak. Peneliti menyimpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi koordinasi lintas sektoral, adapun simpulan tersebut sebagai berikut :

### 1. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan peranan yang penting dalam pelaksanaan koordinasi, hal ini dikarenakan tanggung jawab koordinasi terletak pada seorang pimpinan. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa pola kepemimpinan yang ada di Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) yang melakukan koordinasi masih belum optimal. Dimana pola kepemimpinan dari unsur pimpinan masih terbilang kurang tegas, profesional dan kurang dapat mengkoordinir bawahan dengan baik. Kepemimpinan dari Kepala Bidang yang kurang optimal berdampak pula pada koordinasi yang dilakukan oleh pihak instansi pemerintah yang melakukan koordinasi dalam pengembangan pariwisata.

### 2. Dinamisme

Faktor yang terpenting dalam koordinasi salah satunya adalah dinamisme. Koordinasi seharusnya berubah seiring dengan perkembangan waktu. Dari hasil penelitian yang ditemukan dilapangan, koordinasi yang dilakukan oleh instansi Disbudparpora adalah dengan cara mengundang pimpinan instansi terkait dalam setiap acara yang diadakan oleh disbudparpora. Tapi dalam hal ini tidak diketahui tujuan jelas untuk apa mengundang pimpinan instansi tersebut karena tidak ada keterkaitan dalam pengembangan pariwisata. Pengiriman surat seperti ini selalu dilakukan oleh disbudparpora tanpa adanya perubahan. Misalnya tujuan dari pengiriman undangan kedalam acara disbudparpora adalah selain untuk menghadiri acara tersebut juga untuk memberitahukan dan sama-sama meminta solusi terkait tantangan yang dihadapi disbudparpora dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Landak karena hal ini adalah tanggungjawab bersama.

### 3. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas

Simpulan yang dari faktor perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas ini adalah Dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2008 yang mengatur tentang tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dituangkan bahwa seharusnya Disbudparpora memiliki wewenang untuk pelaksanaan koordinasi tugas fungsi dan pokok dalam pengembangan pariwisata. Sedangkan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti instansi sektoral masih belum menerapkan dengan baik tugas pokok dan fungsinya yang tertuang dalam Peraturan Bupati Masing-masing sehingga faktor perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas menjadi faktor yang mempengaruhi suatu koordinasi yang efektif.

### 4. Organisasi yang sederhana

Organisasi yang sederhana merupakan salah satu faktor yang menjadi hambatan dalam menjalankan koordinasi. Jenis organisasi yang ditemukan dilapangan adalah organisasi garis dan staf, yaitu organisasi yang daerah kerjanya luas dan mempunyai bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit. Hasil penelitian organisasi ini terdiri dari bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata. Bidang yang ditemukan sangat beranekaragam berbeda antara satu dengan yang lainnya yang berdampak membutuhkan jumlah pegawai yang banyak pula. Dan semua ini akan berdampak pada koordinasi internal yang dilaksanakan. Selain itu memerlukan anggaran yang besar karena harus dibagi kepada bidang-bidang yang memerlukan anggaran yang sangat besar. Meskipun mendapatkan anggaran yang sedikit maka akan dibagi lagi hal ini membuat kurangnya dana yang berdampak pada koordinasi yang dilakukan semakin minim.

Selain 4 (empat) faktor diatas, peneliti menemukan faktor lain yang turut mempengaruhi koordinasi antara instansi lintas sektoral yaitu keuangan dan masyarakat sekitar. Jika anggaran keuangan yang di anggarkan tidak setuju malah semakin kecil maka kegiatanpun banyak yang di hilangkan maka yang dirasa sangat prioritaslah yang dilaksanakan. Hal ini pastinya tidak dapat emndukung perkembangan pariwisata di Kabupaten Landak. Faktor yang kedua adalah masyarakat sekitar, masyarakat sekitar masih belum menerima jika daerah tempatnya dijadikan objek wisata yang akan didatangi oleh wisatawan sehingga daerah mereka akan ramai dan tidak terkendali. Selain itu masyarakat juga belum mempunyai pemikiran untuk melestarikan budaya atau tempat wisata, seperti mulai pudarnya budaya khas local karena dipengaruhi budaya barat dan tidak merawat sarana dan prasarana yang ada.

## 2. Keterbatasan Studi

Selama melakukan penelitian tentang Koordinasi Lintas Sektoral Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Landak peneliti mengalami banyak hambatan dalam melaksanakan penelitian, sehingga banyak kekurangan yang terjadi skripsi ini belum dapat mencapai kesempurnaan. Adapun keterbatasan- keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

- a. Luasnya permasalahan sehingga teori yang digunakan dalam penelitian ini belum mampu menjelaskan seluruh permasalahan secara rinci yang terjadi di lapangan.
- b. Kurangnya literatur mengenai konsep-konsep ataupun teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

## 3. Apresiasi

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan

penelitian di tempat tersebut dan telah banyak memberikan bantuan kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur Buku Bacaan

- A, Yoeti, Oka. 2002. *Perencanaan Strategis*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- \_\_\_\_\_.2002. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Kencana, Inu. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung : Pustaka Reka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kusmayadi, dan Endar Sugiarto. 2000. *Metode Penelitian Dalam Bidang Kepariwisataaan*. Jakarta : Gramedia.
- Kusudianto. 1996. *Perencanaan Pembangunan Destinasi Pariwisata*. Jakarta: UI Press
- Lembaga Administrasi Negara. 2008. *Koordinasi dan Hubungan Kerja*. Jakarta : LAN.
- Moekijat. 1994. *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Bandung : Mandar Maju
- Pendit, Nyoman S. 2003. *Ilmu Pariwisata*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Pitana, I Gede dan Diarta I Ketut Surya. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Andi: Yogyakarta.
- Strauss, Anselm. And Juliet Corbin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugandha, Dann. 1988. *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Jakarta : Intermedia.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatifm Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatifm Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

\_\_\_\_\_. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.

Sutarto. 1993. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta : Gajah Mada University

Suwantoro. 1997. *Dasar-dasar pariwisata*. Yogyakarta : Andi

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Landak.

Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Landak





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124  
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>  
Email : [jurnalmhs@fisip.untan.ac.id](mailto:jurnalmhs@fisip.untan.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : FUADDIANTO FAJAR SATRIO  
NIM / Periode lulus : E42009049/ 2013  
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI  
Email address/HP : [luang.andalan@yahoo.com](mailto:luang.andalan@yahoo.com) / 085246902009

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

KOORDINASI LINTAS SEKTORAL DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA  
DI KABUPATEN LANDAK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext  
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui  
Pengelola Jurnal.....

H. Wijaya Kusuma, MA, Ph.D  
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak  
Pada Tanggal : 8 Februari 2014

(FUADDIANTO FAJAR SATRIO)

